

2) Tantangan yang Dihadapi

- Masih adanya keterlambatan bahan/materi rapat
- Sering terjadinya Kepala SKPD yang diwakilkan dalam menghadiri Rapat/Kunjungan Kerja.
- Kurang disiplinnya terutama soal ketepatan waktu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme kegiatan/rapat-rapat di DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengalami berbagai macam kendala yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, yang digambarkan pada tabel 3.1 Identifikasi masalah yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Tabel 3.1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Capaian persentase	Ketersediaan dukungan anggaran yang cukup memadai	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Kompetensi SDM aparatur dan jumlah anggaran Sekretariat yang kurang memadai
			Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat dengan DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jejaring asmara secara dinamis dan demokratis	Keterbatasan sarana dan prasarana
			Tersedianya Tata Tertib/ Kode Etik yang mendukung pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang/ rapat rendah
				Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Konsistensi anggota dalam melaksanakan Tata Tertib dan Kode Etik kurang

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya masih menghadapi permasalahan dalam melaksanakan fungsinya, permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Belum optimalnya fungsi Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas untuk mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- 4) Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya;
- 5) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh;
- 6) Sering terjadinya perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintahan;

- 7) Masih sering terjadinya campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- 8) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagai organisasi yang inferior;
- 9) Belum adanya sinergitas yang baik antara unit kerja dan masyarakat yang terlibat langsung dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Proses Pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa lepas dari kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini.

Oleh karena itu Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya ingin melakukan perbaikan dan penyempurnaan disegala bidang dengan konsep pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang dituangkan dalam Visi **“Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**.

Penjelasan Visi Bupati Tasikmalaya sebagaimana dimaksud adalah :

Dengan Semangat Gotong Royong :

Dengan semangat gotong royong adalah semangat bekerja sama satu sama lainnya untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Religius/Islami :

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religius *adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzamkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran.

Sistem yang mengatur tata keimanan(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘**Salm**’ (السَّلَام) **yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’** (أَسْلَمَ) **yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”;** 3) **Saliim’** (سَالِيمٌ) **yang berarti bersih dan suci; 4) Salam’** (سَلَامٌ) **yang berarti selamat dan sejahtera.** Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil ‘alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, **Religius/Islami** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek **Religius/Islami** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman.

Kalimat "**Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami**" sebagaimana terumuskan dalam "**visi**" dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Berdaya Saing dan Sejahtera :

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing dan sejahtera bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

Berdasarkan Visi tersebut, maka Misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat perkembangan ekonomi kerakyatan, berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan uraian dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala local, Nasional dan Global..

Dari ke empat Misi di atas yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah *Misi ke 2* yaitu ***“Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional”***.

Tabel 3.1.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang melayani bersih, dan profesional)			
1	Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kompetensi Sumber Daya Apratur Sekretariat DPRD yang belum optimal	Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan	Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
		Belum optimalnya fungsi Struktur Organisasi Sekretariat DPRD yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Optimalisasi ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Masih sering terjadinya campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
		Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yakni memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah, maka visi yang ingin dicapai/diwujudkan yaitu pelayanan prima untuk menunjang tugas-tugas DPRD Kabupaten Tasikmalaya sehingga setiap kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan lancar dan terarah serta mencapai hasil dengan baik. Sehingga sasaran yang diharapkan yaitu meningkatnya kinerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan terbinanya satu hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah serta makin meningkatnya stabilitas daerah yang kondusif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu-isu strategis dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi, jumlah pegawai dan sarana/prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dan digerakkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yaitu pegawai, prasarana yang belum lengkap dan kurang memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan;
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD

Kabupaten Tasikmalaya merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat;

4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka makin meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
5. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Tujuan Pelaksanaan kegiatan pemerintah Daerah terutama Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya diperlukan agar mendukung pemerintahan yang senantiasa dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang melayani, baik, bersih dan professional, memperbaiki kinerja sektor publik dan sekaligus mengubah praktek administrasi yang tertib.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan agar tetap unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang dinamis. Dalam menghadapi perubahan - perubahan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus dapat menciptakan situasi kerja yang kondusif serta nilai-nilai yang ada manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dengan produk yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Jika aparatur tidak mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, maka eksistensinya dalam organisasi tersebut akan berakhir

merupakan penjabaran implementasi dan pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam

Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 s.d 2026 yaitu *Terintegrasinya Program-program DPRD untuk melaksanakan Tri fungsi DPRD yaitu :Fungsi Legislas / Pembentukan Ranperda, Fungsi Pengawasan, Perda dan Fungsi Budgeting / Anggaran.*

Sasaran merupakan bagian dari proses perencanaan strategis sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan Tujuan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan spesifik, terukur dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam Misi 2 dengan mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional yaitu :

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Penguatan partisipasi public melalui pengembangan komunikasi kepala Daerah dengan masyarakat dalam forum Rembug Warga dan Halaqah , Pembangunan Daerah bersama para ulama dan tokoh Masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan public yang cepat, mudah dan murah berbasis teknologi informasi;
3. Percepatan Pembangunan Daerah melalui sinergidan sinkronisasi perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
4. Optimalisasi ketepatan alokasi dan distribusi anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD untuk peningkatan kesejahteraan Rakyat dan pemenuhan pelayanan dasar;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan melalui penerapan E-Government untuk mewujudkan Good Government dan Clean Government;
6. Peningkatan kapasitas, disiplin kinerja dan kesejahteraan aparatur;
7. Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Rukun Tetangga / Rukun Warga (RT/RW);
8. Pemerataan Pembangunan kewilayahan melalui Pagu Indikatif RT/RW;
9. Optimalisasi persiapan pembangunan wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan.

Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi DPRD,

maka indikator sasaran yang ditetapkan antara lain :

- 1) Cakupan Fasilitasi Legislasi / Pembahasan Ranperda;
- 2) Cakupan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD;
- 3) Cakupan Fasilitasi Fungsi Budgeting;

Untuk lebih jelasnya perumusan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TAHUN					
				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Tiga Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tiga Fungsi DPRD	100	100	100	100	100	100	1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya	Point	65	65	66	66	66	66
											Nilai IKM	Point	78,30	78,30	80,30	80,30	80,30	80,30
									2	Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang didasarkan pada tujuan dan sasaran serta visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya Visi Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, dan Berdaya Saing dan Sejahtera”**.

Sedangkan Misi yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat perkembangan ekonomi kerakyatan, berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan uraian dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala local, Nasional dan Global..

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan uraian dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala local, Nasional dan Global..

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi

yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, realitis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Strategi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yaitu berupa strategi dalam Peningkatan kapasitas, fungsi dan Peran DPRD.

Strategi untuk mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan tersebut adalah sebagai berikut :

- Strategi SO yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara menggabungkan kekuatan dengan peluang. Strategi ini bersifat Agresif Strategis.
- Strategi ST yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, dengan cara menggabungkan kekuatan dengan ancaman. Strategi ini bersifat Diversifikasi Strategi.
- Strategi WO yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dengan cara menggabungkan antara kelemahan dengan peluang. Strategi ini bersifat integrasi ke dalam, ke depan dan ke belakang.
- Strategi WT yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan menghindari ancaman. Strategi ini sifatnya Defensif Strategi.
- Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis, yang meliputi aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dapat disusun beberapa strategi :

Analisis SWOT dari Program, Sasaran dan Strategi yang

dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Strategi Kekuatan-Peluang (S-O)

Strategi (S-O) yaitu strategi pencapaian tujuan melalui pengerahan seluruh kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal yang sebesar-besarnya, strategi tersebut dapat diimplementasikan kedalam bentuk strategi kebijakan dan pelaksanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dengan :

- Meningkatkan pelayanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
- Meningkatkan penataan ruang kantor Setwan yang lebih representative;
- Mengantisipasi dinamika masyarakat melalui peningkatan koordinasi.

B. Strategi Kelemahan-Peluang (W-O)

Strategi W-O yaitu strategi pencapaian tujuan dengan meminimalkan kelemahan-kelemahan internal dengan cara memanfaatkan peluang eksternal. Strategi kebijakan dan aksi operasional tersebut diuraikan sebagai berikut :

- Optimalisasikan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Kembangkan Sistem Informasi Manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan pelayanan;
- Tingkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan;
- Penataan kembali kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan.

C. Strategi Kekuatan-Ancaman (S-T)

Strategi S-T yaitu strategi pencapaian tujuan melalui penggunaan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Uraian dari strategi tersebut secara rinci yaitu :

- Gunakan kewenangan untuk meningkatkan disiplin kerja dan koordinasi.

D. Strategi Kelemahan-Ancaman (W-T)

Strategi W-T yaitu strategi pencapaian tujuan melalui meminimalisasi kelemahan internal dan menghindari eksternal. Strategi ini berangkat dari kondisi yang sangat minimal yaitu tanpa ada kekuatan pendorong dan harus meminimalkan kelemahan sekaligus menghindarkan ancaman. Strategi tersebut melahirkan kebijakan sebagai berikut :

- Meningkatkan disiplin kerja aparatur;
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga.

Kebijakan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diperlukan suatu kewenangan yang dapat dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk untuk tercapainya kelancaran dan sinergitas mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi yaitu berupa kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah, kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kewenangan yang ada.

Adapun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur;
2. Pengadaan, penataan serta pemeliharaan sarana dan prasarana;
3. Penerapan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual;
4. Mewujudkan prosedur kerja yang efektif, efisien melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tabel 5.1.1

**Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

<p align="center">Faktor Eksternal</p>	<p>Peluang (Opportunities) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SKPD lain dan masyarakat yang memerlukan fasilitasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Meningkatnya daya kritis masyarakat sehingga dapat menambah volume kegiatan DPRD yang perlu dukungan/fasilitasi Sekretariat DPRD. 	<p>Tantangan (Threats) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya keterlambatan bahan/materi rapat; Sering terjadinya Kepala SKPD yang diwakilkan dalam menghadiri Rapat/Kunjungan Kerja; Kurang disiplinnya anggota DPRD; Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme kegiatan/rapat-rapat di DPRD.
<p align="center">Faktor Internal</p> <p>Kekuatan (Strengths) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 49 Tahun 2021; Peran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang strategis; Kewenangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyediaan tenaga ahli; Dukungan anggaran operasional untuk melaksanakan pelayanan/fasilitasi kegiatan DPRD. 	<p>Alternatif Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan berdasarkan kewenangan yang dimiliki; Meningkatkan penataan ruang kantor Sekretariat DPRD yang lebih representative; Mengantisipasi dinamika masyarakat melalui peningkatan koordinasi. 	<p>Alternatif Strategi ST :</p> <p>Gunakan kewenangan untuk meningkatkan disiplin kerja dan koordinasi</p>
<p>Kelemahan (Weakness) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Belum memilikinya sistem informasi manajemen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Terbatasnya Sumber Daya Aparatur; Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan. 	<p>Alternatif Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasikan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Kembangkan Sistem Informasi Manajemen Setwan untuk meningkatkan pelayanan; Tingkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan; Penataan kembali kelembagaan untuk meningkatkan pelayanan. 	<p>Alternatif Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan disiplin kerja aparatur; Meningkatkan koordinasi antar lembaga.

Tabel 5.1.2

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

Visi	:	Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera
Misi	:	Mewujudkan Pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Fasilitasi pelaksanaan tiga fungsi DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Sekretariat DPRD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
		Keteraturan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Pengendalian Interen Administrasi Keuangan
		Meningkatkan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aparatur
		Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Lembaga	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah
	2. Meningkatkan Kualitas Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	Fasilitasi Harmonisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Koordinasi Dalam Pemenuhan Usulan Rancangan Perda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh SEkretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program, kegiatan dan sub. kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Oleh karena itu, masing-masing rencana program dan kegiatan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Secara teknis, penentuan program prioritas daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 didasarkan pada *interest* dan keinginan yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan pada saat pencalonan menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada yang lalu. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan. Penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Beberapa program pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya unsur pendukung urusan pemerintahannya adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Sub. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Sub. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel
- b. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- a. Sub. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- b. Sub. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
- c. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- d. Sub. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
- e. Sub. Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD

Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

- a. Sub. Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
- b. Sub. Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Sub. Kegiatan Pembahasan APBD
- d. Sub. Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
- e. Sub. Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Sub. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
- b. Sub. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- c. Sub. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- d. Sub. Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- e. Sub. Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

- a. Sub. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- b. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- c. Sub. Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD

Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- a. Sub. Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
- b. Sub. Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Reses

Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- a. Sub. Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- a. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- b. Sub. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- c. Sub. Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- b. Sub. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- c. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

- a. Sub. Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
- b. Sub. Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

**TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATU AN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp.
					TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.	TAR GET	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12		
						64.381.098.071		68.585.570.878		91.004.383.123		91.004.383.123		91.004.383.123		91.004.383.123		405.979.661.718
4.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	Point	64,81	65, 00	81.000.000	65,00	100.642.436	66,00	155.674.558	66,00	155.674.558	66,00	155.674.558	66, 00	155.674.558	66,00	648.666.110
		Nilai IKM Sekretariat DPRD	Point	77,28	78, 30	47.713.279.427	78,30	48.765.771.301	80,30	53.109.734.424	80,30	53.109.734.424	80,30	53.109.734.424	80, 30	53.109.734.424	80,30	255.808.254.000
4.02.0 1.201	Perencanaan, penganggara n, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggara n dan Evaluasi Kinerja	Lapo ran	65	13	81.000.000	13	100.642.436	13	155.674.558	13	155.674.558	13	155.674.558	13	155.674.558	65	648.666.110
4.02.0 1.201. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok ume n	15	3	26.000.000	3	65.000.000	3	88.250.000	3	88.250.000	3	88.250.000	3	88.250.000	15	355.750.000

4.02.0 1.201. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	4	25.000.000	4	15.000.000	4	25.750.000	4	25.750.000	4	25.750.000	4	25.750.000	20	117.250.000
4.02.0 1.201. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	6	30.000.000	6	20.642.436	6	41.674.558	6	41.674.558	6	41.674.558	6	41.674.558	30	175.666.110
4.02.0 1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Sesuai Aturan	%	100	20 (10 0)	6.354.469.100	20 (100)	6.354.469.100	20 (100)	6.672.192.555	20 (100)	6.672.192.555	20 (100)	6.672.192.555	20 (100)	6.672.192.555	100	32.725.515.865

4.02.0 1.202. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	250	50	6.354.469.100	50	6.354.469.100	50	6.672.192.555	50	6.672.192.555	50	6.672.192.555	50	6.672.192.555	250	32.725.515.865
4.02.0 1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	%	100	20 (100)	309.020.000	20 (100)	237.532.600	20 (100)	405.083.788	20 (100)	405.083.788	20 (100)	405.083.788	20 (100)	405.083.788	100	1.761.803.963
4.02.0 1.205. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5	1	90.020.000	1	46.570.000	1	48.898.500	1	48.898.500	1	48.898.500	1	48.898.500	5	283.285.500
4.02.0 1.205. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	250	50	219.000.000	50	190.962.600	50	356.185.288	50	356.185.288	50	356.185.288	50	356.185.288	250	1.478.518.463

4.02.0 1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	%	100	20 (100)	2.199.241.850	20 (100)	2.236.567.250	20 (100)	3.891.755.638	20 (100)	3.891.755.638	20 (100)	3.891.755.638	20 (100)	3.891.755.638	100	16.111.076.013
4.02.0 1.206. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	489.562.350	1	362.545.750	1	380.673.038	1	380.673.038	1	380.673.038	1	380.673.038	5	1.994.127.213
4.02.0 1.206. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang-barang Cetak dan Penggandaan Dokumen-dokumen	Paket	5	1	377.170.500	1	395.637.500	3	1.958.779.400	3	1.958.779.400	3	1.958.779.400	3	1.958.779.400	11	6.649.146.200
4.02.0 1.206. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Sumber Informasi dan Referensi dari Buku-buku	Dokumen	10	2	135.907.000	2	133.060.000	2	139.713.000	2	139.713.000	2	139.713.000	2	139.713.000	10	688.106.000

4.02.0 1.206. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	12	565.110.000	12	713.832.000	12	749.523.600	12	749.523.600	12	749.523.600	12	749.523.600	60	3.527.512.800
4.02.0 1.206. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD ke Luar Daerah	Laporan	60	12	631.492.000	12	631.492.000	12	663.066.600	12	663.066.600	12	663.066.600	12	663.066.600	60	3.252.183.800
4.02.0 1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%	100	20 (100)	846.526.900	20 (100)	851.347.600	20 (100)	893.914.980	20 (100)	893.914.980	20 (100)	893.914.980	20 (100)	893.914.980	100	4.379.619.440
4.02.0 1.207. 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair Kantor	Unit	2	2	109.580.000	2	309.280.000	42	324.744.000	42	324.744.000	42	324.744.000	42	324.744.000	130	1.393.092.000
4.02.0 1.207. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	22	22	604.155.000	22	542.067.600	22	569.170.980	22	569.170.980	22	569.170.980	22	569.170.980	110	2.853.735.540
4.02.0 1.207. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Terpenuhinya Pelayanan dalam Bentuk Pengadaan Barang Milik Daerah untuk DPRD dan Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya	Unit	2	2	132.791.900	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	132.791.900

4.02.0 1.208. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	%	100	20 (10 0)	1.914.180.100	20 (100)	1.953.790.000	20 (100)	2.051.479.500	20 (100)	2.051.479.500	20 (100)	2.051.479.500	20 (100)	2.051.479.500	100	10.022.408.600
4.02.0 1.208. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Informasi, Sarana Komunikasi, Telepon, Listrik dan Internet- Meningkatn ya Kinerja terhadap Pelayanan Keseekretariat an DPRD	Lapo ran	60	12	532.200.000	12	532.200.000	12	529.810.000	12	529.810.000	12	529.810.000	12	529.810.000	60	2.653.830.000
4.02.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lapo ran	135	27	1.381.980.100	27	1.421.590.000	27	1.521.669.500	27	1.521.669.500	27	1.521.669.500	27	1.521.669.500	135	7.368.578.600
4.02.0 1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	%	100	20 (10 0)	1.810.274.825	20 (100)	2.478.488.599	20 (100)	2.809.053.004	20 (100)	2.809.053.004	20 (100)	2.809.053.004	20 (100)	2.809.053.004	100	12.715.922.436

4.02.0 1.209. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	80	16	808.920.000	16	383.460.000	16	402.633.000	16	402.633.000	16	402.633.000	16	402.633.000	80	2.400.279.000
4.02.0 1.209. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	6	256.920.000	6	229.226.861	6	240.688.204	6	240.688.204	6	240.688.204	6	240.688.204	30	1.208.211.473
4.02.0 1.209. 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	N/ A	-	5	50.000.000	5	52.500.000	5	52.500.000	5	52.500.000	5	52.500.000	20	207.500.000
4.02.0 1.209. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	80	81.620.000	130	235.000.000	130	116.365.000	130	116.365.000	130	116.365.000	130	116.365.000	600	665.715.000
4.02.0 1.209. 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	10	2	438.185.225	2	696.927.638	2	1.068.798.995	2	1.068.798.995	2	1.068.798.995	2	1.068.798.995	10	4.341.509.848

4.02.0 1.209. 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	25	5	224.629.600	5	883.874.100	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805	5	928.067.805	25	3.892.707.115
4.02.0 1.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	20 (100)	33.613.045.652	20 (100)	33.717.908.152	20 (100)	35.403.803.560	20 (100)	35.403.803.560	20 (100)	35.403.803.560	20 (100)	35.403.803.560	100	173.542.364.483
4.02.0 1.215. 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang	250	50	33.014.395.652	50	33.014.395.652	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	50	34.665.115.435	250	170.024.137.608
4.02.0 1.215. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	35	7	519.550.000	7	622.362.500	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625	7	653.480.625	35	3.102.354.375
4.02.0 1.215. 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	250	50	79.100.000	50	81.150.000	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500	50	85.207.500	250	415.872.500

4.02.0 1.216	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi DPRD	Laporan	260	52	666.521.000	52	935.668.000	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400	52	982.451.400	260	4.549.543.200
4.02.0 1.216. 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	60	12	241.521.000	12	510.668.000	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400	12	536.201.400	60	2.360.793.200
4.02.0 1.216. 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	200	40	425.000.000	40	425.000.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000	40	446.250.000	200	2.188.750.000
4.02.0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	71,3	20 (100)	16.586.818.644	20 (100)	19.719.157.141	20 (100)	37.738.974.141	20 (100)	37.738.974.141	20 (100)	37.738.974.141	20 (100)	37.738.974.141	100	149.522.741.608

4.02.0 2.201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun	Doku men	55	11	3.055.153.144	10	3.496.973.641	11	3.897.663.641	11	3.897.663.641	11	3.897.663.641	11	3.897.663.641	54	18.245.117.108
4.02.0 2.201. 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Doku men	5	1	429.810.000	1	881.220.000	1	1.014.810.000	1	1.014.810.000	1	1.014.810.000	1	1.014.810.000	5	4.355.460.000
4.02.0 2.201. 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Doku men	5	1	1.679.770.000	1	1.862.960.000	1	678.522.000	1	678.522.000	1	678.522.000	1	678.522.000	5	5.578.296.000
4.02.0 2.201. 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Doku men	10	2	163.402.840	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	2	242.754.939	10	1.134.422.596

4.02.0 2.201. 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/K eterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Doku men	30	6	497.480.200	6	510.038.702	6	1.811.822.502	6	1.811.822.502	6	1.811.822.502	6	1.811.822.502	30	6.442.986.408
4.02.0 2.201. 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Doku men	5	1	284.690.104			1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000	1	149.754.000	4	733.952.104
4.02.0 2.202	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan	Doku men	30	5	1.058.800.000	5	1.025.440.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	10	2.249.304.000	40	8.832.152.000
4.02.0 2.202. 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS)	Doku men	5	1	212.720.000	1	212.720.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	8	1.765.576.000
4.02.0 2.202. 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Doku men	5	1	212.720.000	1	212.720.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	2	446.712.000	8	1.765.576.000

4.02.0 2.202. 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Doku men	5	1	211.120.000	1	200.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	2	420.000.000	8	1.671.120.000
4.02.0 2.202. 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Doku men	5	1	211.120.000	1	200.000.000	2	233.970.000	2	233.970.000	2	233.970.000	2	233.970.000	8	1.113.030.000
4.02.0 2.202. 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Doku men	N/A	N/ A		N/A		1	467.940.000	1	467.940.000	1	467.940.000	1	467.940.000	3	1.403.820.000
4.02.0 2.202. 06	Pembahasan Pertanggungj awaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggun gjawaban APBD	Doku men	5	1	211.120.000	1	200.000.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	5	1.113.030.000
4.02.0 2.203	Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintah an	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penampunga n Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Lapo ran	85	17	2.351.948.000	17	2.890.940.000	42	6.119.817.000	42	6.119.817.000	42	6.119.817.000	42	6.119.817.000	160	23.602.339.000

4.02.0 2.203. 01	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Pemerintah n dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Pemerintah n dan Hukum	Lapo ran	20	4	176.994.000	4	443.360.000	10	1.038.466.000	10	1.038.466.000	10	1.038.466.000	10	1.038.466.000	38	3.735.752.000
4.02.0 2.203. 02	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Infrastruktur	Lapo ran	20	4	367.584.000	4	753.280.000	10	1.776.082.000	10	1.776.082.000	10	1.776.082.000	10	1.776.082.000	38	6.449.110.000
4.02.0 2.203. 03	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lapo ran	20	4	236.794.000	4	478.500.000	10	1.407.274.000	10	1.407.274.000	10	1.407.274.000	10	1.407.274.000	38	4.937.116.000
4.02.0 2.203. 04	Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah n Bidang Perekonomian	Lapo ran	20	4	238.916.000	4	495.800.000	10	1.222.870.000	10	1.222.870.000	10	1.222.870.000	10	1.222.870.000	38	4.403.326.000

4.02.0 2.203. 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	N/A	N/A		N/A		1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	3	701.910.000
4.02.0 2.203. 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5	1	1.331.660.000	1	720.000.000	1	441.155.000	1	441.155.000	1	441.155.000	1	441.155.000	5	3.375.125.000
4.02.0 2.204	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen	25	8	3.897.330.000	5	3.965.700.000	12	9.110.338.000	12	9.110.338.000	12	9.110.338.000	12	9.110.338.000	49	35.194.044.000
4.02.0 2.204. 02	Bimbingan Teknis DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	10	2	2.239.900.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000	2	2.449.400.000	10	12.037.500.000
4.02.0 2.204. 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi	Dokumen	5	1	1.003.800.000	1	839.500.000	1	5.324.500.000	1	5.324.500.000	1	5.324.500.000	1	5.324.500.000	5	17.816.800.000

		dan Dokumentasi Dewan																
4.02.0 2.204. 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	N/A	N/A		N/A	7	510.668.000	7	510.668.000	7	510.668.000	7	510.668.000	21	1.532.004.000	
4.02.0 2.204. 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	5	4	475.000.000	1	491.800.000	1	591.800.000	1	591.800.000	1	591.800.000	1	591.800.000	8	2.742.200.000
4.02.0 2.204. 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	5	1	178.630.000	1	185.000.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	1	233.970.000	5	1.065.540.000
4.02.0 2.205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen	80	16	3.559.637.500	16	4.257.428.500	16	4.634.728.500	16	4.634.728.500	16	4.634.728.500	16	4.634.728.500	80	21.721.251.500
4.02.0 2.205. 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	60	12	1.084.100.000	12	1.399.000.000	12	1.438.800.000	12	1.438.800.000	12	1.438.800.000	12	1.438.800.000	60	6.799.500.000

4.02.0 2.205. 02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dok ume n	5	1	186.832.500	1	246.587.000	1	246.587.000	1	246.587.000	1	246.587.000	1	246.587.000	5	1.173.180.500
4.02.0 2.205. 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dok ume n	15	3	2.288.705.000	3	2.611.841.500	3	2.949.341.500	3	2.949.341.500	3	2.949.341.500	3	2.949.341.500	15	13.748.571.000
4.02.0 2.206	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Lapo ran	20	4	174.760.000	4	246.500.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000	38	2.183.460.000
4.02.0 2.206. 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Lapo ran	20	4	174.760.000	4	246.500.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000	10	587.400.000	38	2.183.460.000
4.02.0 2.207	Pembahasan Kerja sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah	Dok ume n	N/A	N/ A	N/A	N/A	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000
4.02.0 2.207. 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dok ume n	N/A	N/ A	N/A	N/A	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000

		Yang Disusun																
4.02.0 2.208	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen	90	18	2.489.190.000	18	3.836.175.000	31	10.555.051.000	31	10.555.051.000	31	10.555.051.000	31	10.555.051.000	129	38.994.378.000
4.02.0 2.208. 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	50	10	1.369.050.000	10	2.296.000.000	10	6.140.651.000	10	6.140.651.000	10	6.140.651.000	10	6.140.651.000	50	22.087.003.000
4.02.0 2.208. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	20	4	904.140.000	4	1.301.750.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	38	8.853.740.000
4.02.0 2.208. 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Undangan dan Kegiatan Pimpinan DPRD	Dokumen	20	4	216.000.000	4	238.425.000	10	470.910.000	10	470.910.000	10	470.910.000	10	470.910.000	38	1.867.155.000

	2.062.160.000	1	2.062.160.000	1	2.062.160.000	1	2.062.160.000	3	6.186.480.000
--	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------

4.02.0 2.208. 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dok umen	N/A	N/ A		N/A		1
------------------------	--	---	-------------	-----	---------	--	-----	--	---

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah di daerah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah terkait sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi terkait kepemimpinan dan prestasi yang terjadi dalam tubuh organisasi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai sesuai harapan.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam enam tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	60	62	65	68	70	75
2	Nilai IKM Kabupaten	79	80	80	80,15	80,30	80,50	81
3	Persentase Fasilitasi Dukungan Terhadap Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah dokumen perangkat daerah untuk perencanaan periode 5 tahun yang menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam menentukan langkah kerja yang akan dilakukan sehingga konsisten dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai wujud perencanaan, tanggung jawab atas pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan didukung sumber daya manusia yang profesional dan handal, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan yang akuntabel, transparan, dan konsisten berlandaskan komitmen yang telah dibangun dan disepakati.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ditentukan pula target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu: **Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 akan menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja. Karena itu, dokumen ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya terkait perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Desember 2021

Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. ASEP DARISMAN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680101 198803 1 007